



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK



PROFIL

KEPENDUDUKAN DAN BANGGA KENCANA KABUPATEN LEBAK PERIODE TAHUN 2025



**PROFIL KEPENDUDUKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA
(BANGGA KENCANA)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK**

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025

Persembahan dari :



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK**

PENASIHAT

LINA BUDIARTI, S.H., M.H.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kabupaten Lebak

PENGARAH

Hj. TUTI NURASIAH, SKM.MKM

Kepala Bidang DALDUK KB-KS

SILVY UTAMI PRIYANTINA, SST

Penata KKB (SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK)

PENULIS DAN PENYUSUN

SITI MARIAH, Amd. Keb

FUNGSIONAL UMUM

PENGOLAH DATA

DAVID APRIYANA NOER ADHA, S.Sos

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

EDITOR

DIMAS OKTA PERMADI, S.Sos

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

DESIGNT GRAFIS

AMMAR FACHRI HENDRAWAN, S.I.Kom

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

DITERBITKAN OLEH



BIDANG DALDUK KB -KS

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kabupaten Lebak

KATA PENGANTAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK



Assalamualaikum warrahmatulahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya Buku Profil Kependudukan dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Kabupaten Lebak Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

Buku profil ini disusun sebagai salah satu upaya penyediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan terkini mengenai kondisi kependudukan serta pelaksanaan Program BANGGA KENCANA di Kabupaten Lebak. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program pembangunan keluarga dan kependudukan secara berkelanjutan.

Pembuata Buku Profil Kependudukan dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Kabupaten Lebak Tahun 2025 menampilkan hasil – hasil berupa data Makro maupun Mikro Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga serta Keluarga Berisiko Stunting yang memberikan gambaran kondisi demografi, potensi dan permasalahan kependudukan, capaian program, serta peran lintas sektor dalam mendukung terwujudnya keluarga berkualitas. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, perangkat desa, mitra kerja, akademisi, maupun masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan yang berbasis data.

Adapun Buku Profil Kependudukan dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Kabupaten Lebak Tahun 2025 ini bisa dipakai sebagai untuk kepentingan operasional langsung di lapangan serta kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana disemua tingkat.

Dalam penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyediaan data dan penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Buku Profil Kependudukan dan Program (BANGGA KENCANA) Kabupaten Lebak Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas di Kabupaten Lebak.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kependudukan dan keluarga di Kabupaten Lebak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lebak, 2026
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak,

LINA BUDIARTI, S.H., M.H.
NIP : 19810228 200502 2 005



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	1
1.1 Pengertian Pengendalian	1
1.2 Teori Kependudukan	1
1.3 Teori Pertumbuhan Penduduk	2
1.4 Teori Demografi	2
2. PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN	4
3. TUJUAN PENGENDALIAN PENDUDUK	5
3.1 Keluarga	5
3.2 Penduduk	5
3.3 Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)	6
3.4 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	6
3.5 Total Fertility Rate (TFR)	7
3.6 Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	7
3.7 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	7
3.8 Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	7
3.9 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	8
3.10 Rumah Data Kependudukan	8
4. KELUARGA BERENCANA	9
4.1 Sejarah dan Pengertian Keluarga Berencana	9
4.2 Keluarga	10

4.3 Keluarga Berencana	10
4.4 Pasangan Usia Subur	11
4.5 Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	11
4.6 Peserta KB Baru	11
4.7 Peserta KB Aktif	11
4.8 UnmetNeed	11
5. PEMBANGUNAN KELUARGA	13
5.1 Keluarga Menurut Dimensi Ketentraman	13
5.2 Keluarga Menurut Dimensi Kemandirian	13
5.3 Keluarga Menurut Dimensi Kebahagiaan	13
5.4 Rumah Layak Huni	14
5.5 Bina Keluarga Balita (BKB)	14
5.6 Bina Keluarga Remaja (BKR)	14
5.7 Bina Keluarga Lansia (BKL)	14
5.8 PIK - R	15
5.9 UPPKA	15
6. KELURGA BERISIKO STUNTING	16



1. PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk.

Seperti kita ketahui masalah penduduk sudah menjadi perhatian manusia sejak dahulu kala para negarawan maupun kelompok ahli sudah sering memperbincangkan tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang bagaimana untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk.

1.1 Pengertian Pengendalian

Pengertian menurut Ussy dan Hammer, (dalam Darwin, Muhajir 2000) mengemukakan bahwa "control is management's systematic effort to achieve objectives by comparing performance to plan and taking appropriate action to correct important differences". Maksud dari Ussy and Hammer yaitu Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting.

1.2 Teori Kependudukan

Teori kependudukan di kembangkan oleh dua faktor yang sangat dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para ahli dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penduduk. Sedangkan factor kedua adalah adanya masala-masalah universal yang menyebabkan para ahli harus banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana

telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Penduduk dapat di bagi sebagai berikut;

1.3 Teori Pertumbuhan Penduduk

Dalam buku Edric yang berjudul (The Population Bomb) yang menggambarkan bahwa penduduk dan lingkaran yang ada didunia ini sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; Kedua, keadaan bahan makanan sudah terbatas; Ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia ini lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Pada tahun 1990 Edric merevisi bukunya dengan judul baru (The Population Explotion), yang isinya adalah bom penduduk yang di khawatirkan pada tahun 1968, kini sewaktu-waktu akan dapat meletus. Kerusakan dan pencemaran lingkungan parah karena sudah banyak penduduk yang sangat meresaukan (Ida Bagoes Mantra, 2000: 71).

1.4 Teori Demografi

Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara maka perlu didalami kajian demografi. Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (population studies). Demografi berasal dari kata Yunani demos-penduduk dan Grafien -tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Menurut Munir, dalam teori kependudukan dapat dikembangkan kemudian dipengaruhi dalam dua faktor yang sangat dominan, Pertama ialah meningkatkan pertumbuhan penduduk dinegara negara yang sedang berkembang, dan ini meyebabkan tantangan dari beberapa para ahli dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Kedua adalah masalah yang sifatnya universal yang meyebabkan para ahli harus lebih banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk lebih lanjut sampai sejauh mana hubungan anatara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial dalam kependudukan agar dapat



diterima. Sedangkan Hauser dan Duncan (1959) mengusulkan definisi demografi sebagai berikut: Demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of such changes which maybe identified as natality, territorial movement (migration), and social mobility (change of states). Yang dalam Bahasa Indonesia adalah "Demografi mempelajari jumlah, persebaran, territorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, Gerakan teritorial (migrasi) dan mobilitas social (perubahan status). Dari kedua definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial disekitarnya.



2. PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN

Ada beberapa hal yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang ada di sekitar kita, diantaranya:

- Tingkat kelahiran yang cukup tinggi. Dalam hal ini salah satu faktor yang dapat mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatur jarak kelahiran anak, padahal pemerintah sudah menyarankan kepada masyarakat agar mengatur jaraknya yaitu dengan memanfaatkan alat kontrasepsi yang telah disediakan oleh pemerintah.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk.
- Pada indikator ini adanya ketidakpedulian masyarakat merupakan hal yang sangat berpengaruh, hal ini coba diatasi pemerintah dengan cara lebih seringnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga Melangsungkan pernikahan di usia yang boleh dikatakan masih remaja.

3. TUJUAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Adapun tujuan dari Pengendalian Pertumbuhan Penduduk sebagai landasan dasar Program Bangga Kencana yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya dengan menyediakan data makro terkait Pengendalian Pertumbuhan Penduduk diantaranya :

3.1 Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang-orang yang ada disekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.

3.2 Penduduk

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

- Orang yang tinggal di daerah tersebut;
- Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

3.3 Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)

Penghitungan ASFR 15-19 tahun yaitu membagi jumlah kelahiran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah Wanita pada kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR 15-19 tahun dinyatakan dalam jumlah kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun.

Rumus :

$$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 1000$$

Keterangan :

I = Kelompok Usia 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49

B_i = Jumlah kelahiran Wanita dari kelompok usia ke-i

P_i = Jumlah Wanita kelompok usia ke-i

3.4 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Rumus :

$$P_t = P_0 (1+r)^t \quad \text{Atau} \quad r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Keterangan :

P_t = Jumlah Penduduk Pada Tahun t

P₀ = Jumlah Penduduk pada Tahun dasar

t = Jangka Waktu

r = Laju Pertumbuhan Penduduk

Jika nilai $r > 0$, artinya pertumbuhan penduduk positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika $r < 0$, artinya pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika $r = 0$, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

3.5 Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.

Rumus :

$$\text{TFR} = \frac{\text{JK 15 - 49}}{\text{JP 15 - 49}} \times 1000$$

Keterangan :

TFR = Total Fertility Rate (TFR)

JK 15 – 49 = Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu

JP 15 – 49 = Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama

3.6 Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

PKB/PLKB adalah Pegawai kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN yang berkedudukan di Kecamatan yang bertugas melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB / Bangga Kencana bersama institusi masyarakat pedesaan / perkotaan ditingkatan Desa/ Kelurahan.

3.7 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

Merupakan jejaring kerja pemerintah di tingkat desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu PKB/PLKB dan Kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB.

3.8 Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)

Merupakan Sub jejaring kerja pemerintah di tingkat Rukun Warga (RW), yang berfungsi sebagai fasilitator KB di tingkat RW dan membantu PPKBD, PKB/PLKB dan Kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB.

3.9 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

3.10 Rumah Data Kependudukan

Rumah Data Kependudukan di Kampung KB adalah rumah yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pemanfaatan data kependudukan mulai dari mengunduh, membaca, mengidentifikasi, memverifikasi dan menentukan pilihan data kependudukan.

4. KELUARGA BERENCANA

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat.

Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). Program KB pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu saat Orde Baru. Melalui KB masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal dua anak. Tidak tanggung-tanggung, KB diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam masyarakat. Oleh sebab itu makalah ini disusun untuk mengetahui seluk beluk mengenai penyelenggaraan KB di Indonesia, mulai dari sejarah, proses pelaksanaan, kelebihan dan kekurangan dari KB, serta dampak positif maupun dampak negatif dari pelaksanaan KB.

4.1 Sejarah dan Pengertian Keluarga Berencana

Pelopor gerakan Keluarga Berencana di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967. Yang bergerak secara silent operation. Dalam rangka membantu

masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela, usaha Keluarga Berencana terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967 dimana gerakan Keluarga Berencana di Indonesia memasuki era peralihan jika selama orde lama program gerakan Keluarga Berencana dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pimpinan negara pada waktu itu anti kepada Keluarga Berencana maka dalam masa orde baru gerakan Keluarga Berencana diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah.

Struktur organisasi program gerakan Keluarga Berencana juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968 didirikanlah LKBN yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional sebagai semi Pemerintah, kemudian pada tahun 1970 lembaga ini diganti menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia.

4.2 Keluarga

Keluarga menurut WHO (1969) yaitu sekumpulan anggota keluarga yang berhubungan pertalian darah, perkawinan, adopsi. Menurut Duvall (1976) Keluarga juga sekumpulan orang yang berhubungan, seperti hubungan Perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya umum, sosial dan emosional anggota, meningkatkan mental dan fisik.

4.3 Keluarga Berencana

Berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹⁰ Salah satu indikator program KB yaitu

penggunaan KB saat ini dan CPR (Contraceptive Prevalence Rate). CPR adalah persentase penggunaan alat/cara KB oleh pasangan usia subur (PUS) yaitu WUS (umur 15-49 tahun) berstatus menikah atau hidup bersama.

4.4 Pasangan Usia Subur

Pasangan Usia Subur adalah Pasangan suami istri yang saat ini hidup bersama, baik bertempat tinggal resmi ataupun tidak, dimana usia istri antara 20 tahun sampai 45 tahun.

4.5 Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Cara menghitung CPR adalah membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikali 100.

4.6 Peserta KB Baru

Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi.

4.7 Peserta KB Aktif

Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.



4.8 UnmetNeed

kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

5. PEMBANGUNAN KELUARGA

Pembangunan kependudukan terkait dengan pembangunan keluarga, termaktub dalam Undang-Undang mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU No. 10 tahun 1992 yang diamandemen menjadi UU No. 52 tahun 2009). Menurut UU No 52 tahun 2009 keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga juga dijabarkan dalam PERKA BKKBN No 72 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menekankan pada pembinaan keluarga balita dan anak, ketahanan remaja, pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

5.1 Keluarga Menurut Dimensi Ketenteraman

Dimensi Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga.

5.2 Keluarga Menurut Dimensi Kemandirian

Dimensi Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga.

5.3 Keluarga Menurut Dimensi Kebahagiaan

Dimensi Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.

5.4 Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

5.5 Bina Keluarga Balita (BKB)

Menurut Peraturan Kepala BKKBN No.12 tahun 2018, Bina Keluarga Balita diartikan sebagai layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral.

5.6 Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja (BKR) merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. "baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spiritual.

5.7 Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan keluarga Lansia dan Pralansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia dan Pralansia.



5.8 PIK - R

Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang lebih dikenal dengan PIK-R adalah suatu wadah kegiatan PKBR (Pusat Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi Remaja.

5.9 UPPKA

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera. Anggota dari kelompok UPPKA adalah Pasangan Usia Subur baik yang sudah ber KB maupun yang belum ber KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan ekonomi keluarga.

6. KELURGA BERISIKO STUNTING

Mewujudkan generasi emas 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan pada usianya yang ke-100 tahun Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia berkualitas, yakni sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing. Dapat dikatakan kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik. Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tubuh pendek, tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memiliki daya saing di dalam dunia kerja. Stunting merupakan ancaman utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/anak usia 0 – 23 bulan/anak usia 24 – 59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

Salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak 0-59 bulan. Dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Kader Keluarga Berencana



untuk melaksanakan pendampingan keluarga berisiko stunting. Tim pendamping keluarga akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting. Mereka akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting.